

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses politik serta ekonomi dari dinamika pelarangan TikTok Shop di Indonesia pada tahun 2023 melalui penerapan Permendag No. 31 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengakses data primer melalui wawancara dengan narasumber atau melalui observasi studi literatur yang relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kerangka teori yang digunakan adalah teori analisis Proteksionisme. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa proses dinamika politik yang terjadi mencerminkan interaksi kompleks antara kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi kepentingan lokal, terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dari persaingan tidak sehat dan praktik harga merugikan oleh penjual asing di *platform* TikTok Shop. Langkah yang diambil oleh pemerintah merupakan upaya proteksionisme dalam sektor ekonomi bagi UMKM untuk platform e-commerce. Namun, Proteksionisme merupakan kebijakan yang bisa juga menjadi konsekuensi negatif apabila digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Hal tersebut menjadikan adanya pembatasan akses pasar global produk Indonesia dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, Permendag No. 31 Tahun 2023 bertujuan menjaga stabilitas ekonomi digital Indonesia dengan melindungi UMKM, harga predator, dan mencegah monopoli pasar. Kebijakan ini menciptakan lingkungan bisnis yang adil, namun harus juga mempertimbangkan dampak potensial pada impor, ekspor, dan hubungan perdagangan internasional.

Kata Kunci : TikTok Shop, Pemendag, Kebijakan, Proteksionisme, Regulasi

ABSTRACT

ABSTRACT. This research aims to explore the political process and economic impact of the dynamics of banning TikTok Shops in Indonesia in 2023 through the implementation of Permendag No. 31 of 2023. The research method used is a qualitative method by accessing primary data through interviews with resource persons or through observation of relevant literature studies according to research needs. The theoretical framework used is the theory of protectionism analysis. The results of this study show that the process of political dynamics that occurs reflects the complex interaction between political, economic, and social interests. This policy is an effort by the Indonesian government to protect local interests, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), from unfair competition and adverse pricing practices by foreign sellers on the TikTok Shop platform. The steps taken by the government are an effort to protect the economic sector for MSMEs for e-commerce platforms. However, Protectionism is a policy that can have negative consequences if used for a long period of time. This makes the restriction of global market access for Indonesian products can hinder longterm economic growth. Thus, Permendag No. 31 of 2023 aims to maintain the stability of Indonesia's digital economy by protecting MSMEs, predatory prices, and preventing market monopolies. This policy creates a fair business environment, but it must also consider the potential impact on imports, exports, and international trade relations.

Keyword : TikTok Shop, Permendag, Policy, Protectionism, Regulation